

KONFLIK IDEOLOGI JENDERAL SOEMITRO DAN ALI MOERTOPO DALAM TUBUH MILITER 1971-1974

Siti Nuralfia, Marjono, Riza Afita Surya
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember
e-mail: : fiaa861@gmail.com, marjono@unej.ac.id, surya_riza@unej.ac.id

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik ideologi antara Jenderal Soemitro dengan Jenderal Ali Moertopo dalam kurun waktu 1971-1974. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahapan heuristik, verifikasi sumber, interpretasi sumber, dan historiografi dengan menggunakan pendekatan politikologi dan teori konflik Collins. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ideologi antara Jenderal Soemitro dengan Jenderal Ali Moertopo disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang profesionalisme ABRI dan rivalitas dalam tubuh militer. Perbedaan ideologi memunculkan dualisme di dalam tubuh militer antara Jenderal Soemitro yang berpandangan liberal dan Jenderal Ali Moertopo yang berpandangan machiavellis). Persaingan Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo bermula ketika Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahannya selain fokus pada pemulihan ekonomi juga memperkokoh kekuasaannya atas angkatan bersenjata. Realisasinya didirikan lembaga-lembaga seperti KOPKAMTIB, OPSUS, dan ASPRI (Asisten Pribadi) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Program pemerintah tersebut telah membuka peluang masuknya kepentingan Ali Moertopo, Soemitro, dan elite militer lainnya dalam lingkaran kekuasaan sipil.

Kata kunci: *Jenderal Soemitro, Jenderal Ali Moertopo, Konflik Ideologi, Angkatan Darat*

THE IDEOLOGICAL CONFLICT OF GENERAL SOEMITRO AND ALI MOERTOPO IN THE MILITARY BODY, 1971-1974

Siti Nuralfia, Marjono, Riza Afita Surya
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember
e-mail: : fiaa861@gmail.com, marjono@unej.ac.id, surya_riza@unej.ac.id

Abstract- This research aims to analyze the ideological conflict between General Soemitro and General Ali Moertopo in the period 1971-1974. This research uses historical research methods which include the stages of heuristics, source verification, source interpretation, and historiography by using a political approach and Collins' conflict theory. The results showed that the ideological conflict between General Soemitro and General Ali Moertopo was caused by different views on ABRI's professionalism and rivalry within the military. The difference in ideology gave rise to dualism within the military between General Soemitro who held liberal views and General Ali Moertopo who held Machiavellian views). The rivalry between General Soemitro and General Ali Moertopo began when President Soeharto in the early days of his administration, apart from focusing on economic recovery, also strengthened his power over the armed forces. The realization was the establishment of institutions such as KOPKAMTIB, OPSUS, and ASPRI (Personal Assistant) which aimed to maintain government stability. These government programs opened up opportunities for the interests of Ali Moertopo, Soemitro and other military elites to enter the circle of civilian power.

Keywords: *General Soemitro, General Ali Moertopo, Ideological Conflict, Army*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945 berada dalam situasi yang belum stabil. Beberapa permasalahan baru harus dihadapi oleh bangsa Indonesia yakni keadaan politik yang belum stabil serta situasi keamanan yang buruk (Rofik, 2019). Tindak lanjut dari situasi tersebut, tahun 1945 dibentuk BKR yaitu Badan Keamanan Rakyat yang selanjutnya berganti nama menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden tahun 1947. TNI terdiri dari prajurit dengan latar belakang pendidikan yang beragam yakni eks-KNIL (bentukan Belanda), eks-PETA (bentukan Jepang), dan eks-laskar perjuangan yang merupakan relawan pribumi. Kondisi yang demikian menimbulkan persaingan di dalam tubuh militer tersebut. Hal serupa juga terjadi pada awal Orde Baru, yaitu konflik ideologi yang melibatkan Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo.

Kekuasaan yang begitu menjanjikan telah memunculkan dualisme di dalam tubuh militer antara kubu Soemitro sebagai elite militer profesional dengan Jenderal Ali Moertopo sebagai elite militer yang menginginkan kebebasan bergerak. Diantara kedua kubu elite militer tersebut telah terjadi persaingan secara senyap yang dimulai sejak tahun 1971. Militer yang seharusnya fokus menjaga keutuhan NKRI pada akhirnya disibukkan oleh permasalahan internalnya sendiri. Persaingan Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo bermula ketika Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahannya selain fokus pada pemulihan ekonomi juga memperkokoh kekuasaannya atas angkatan bersenjata. Realisasinya didirikanlah lembaga-lembaga seperti KOPKAMTIB, OPSUS, dan ASPRI (Asisten Pribadi) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan (Yogaswara, 2009). Program pemerintah tersebut telah membuka peluang masuknya kepentingan Jenderal Ali Moertopo, Jenderal Soemitro, dan elite militer lainnya. Keinginan untuk mempertahankan kekuasaannya mengakibatkan konflik antara Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo.

Jenderal Soemitro sebagai PANGKOPKAMTIB dapat menjatuhkan siapa saja yang berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban negara termasuk Presiden itu sendiri. Sedangkan Jenderal Ali Moertopo sebagai Asisten Pribadi Presiden, juga bergerak di bidang ekonomi yang ditanganinya sejak nasionalisasi perusahaan asing terutama perusahaan Belanda (Sutarmi, 2006). Kubu Soemitro lebih condong kepada Amerika Serikat yang murah hati memberikan bantuan militer, sedangkan kubu Ali Moertopo ingin membangun poros Tokyo-Jakarta-Canberra untuk melepaskan diri dari pengaruh barat. Perang dingin kedua kubu juga terjadi dalam hal pengangkatan pejabat militer (Yograswara, 2009). Jenderal Ali Moertopo berniat mengisi Golkar dengan orang-orangnya. Usaha tersebut berhasil digagalkan kubu Jenderal Soemitro yang terdiri dari para Jenderal Hankam guna mencegah agar Golkar tidak menjelma sebagai basis ekstra-militer bagi Jenderal Ali Moertopo.

Ditinjau dari sudut pandang historis, tahun 1970an dapat disebut sebagai tahun-tahun perbaikan ekonomi bangsa Indonesia. Kebijakan pemerintah mayoritas diarahkan untuk menyelamatkan ekonomi nasional terlebih usaha untuk memberantas inflasi, pengamanan kebutuhan pokok rakyat, dan penyelamatan keuangan negara. Militer dilibatkan dalam setiap upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Orde Baru utamanya dalam bidang ekonomi dan politik, dimana militer termasuk memegang peranan utama (Budiarto, 2000). Keterlibatan militer dalam urusan non pertahanan inilah yang dianggap mengganggu profesionalisme militer oleh Jenderal Soemitro.

Jenderal Ali Moertopo dan Soemitro berbeda persepsi dalam memandang profesionalisme ABRI. Soemitro berpendapat ABRI seharusnya lebih meninggalkan peranan sipilnya yang tidak berkaitan dengan segi pertahanan negara. Sebaliknya, Jenderal Ali Moertopo memaknai agar ABRI bisa lebih luwes dengan apapun yang diperintahkan padanya walaupun tidak berkenaan dengan pertahanan negara. ABRI pada akhirnya menjadi arena konflik dari kedua tokoh Jenderal tersebut. Kepentingan serta pemikiran mengenai profesionalisme ABRI yang bertentangan telah menimbulkan konflik antara Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo. Konflik tersebut berpengaruh terhadap hubungan sosial antara Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo yang menyebabkan hilangnya rasa solidaritas sosial sebagai sesama elite militer (Collins, 1975). Konflik keduanya menjadi pemicu terjadinya Malari 1974 atau Malapetaka 15 Januari 1974 yang bersifat

radikal. Berkaca dari uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji perbedaan pandangan antara Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo dalam sudut pandang sipil maupun militer. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang kemiliteran di Indonesia. Sementara manfaat secara praktis dapat menjadi acuan dalam penelitian dengan topik yang serupa.

Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan proses menguji serta menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985). Terdapat 4 tahapan dalam metode penelitian sejarah, yaitu: 1) heuristik, 2) kritik sumber, 3) interpretasi, dan 4) historiografi.

1. Heuristik

Sumber yang ditemukan dalam penelitian ini berupa buku, laporan penelitian, artikel, dan jurnal, skripsi maupun dokumen. Berdasarkan sifatnya sumber dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan berupa buku biografi, koran dan majalah. Buku biografi yang didapatkan yaitu: (1) Soemitro (Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib) karya Ramadhan K.H. (2) Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74 karya Heru Cahyono (3) Sukses Militer dan Mahasiswa ditulis oleh Jenderal Soemitro yang membahas mengenai tugas militer. (4) Ali Moertopo 1924-1984 ditulis oleh anak dan istri Ali Moertopo yang diterbitkan oleh CSIS. (5) Sekar Semerbak: Kenangan Untuk Ali Moertopo buku ini merupakan buku biografi dari Ali Moertopo. Sumber sekunder yang didapatkan yaitu: (1) Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (MALARI) karya A. Yogaswara. (2) Ali Moertopo & Dunia Intelijen Indonesia ditulis oleh M. Aref Rahmat. (3) Militer dan Politik Di Indonesia karya Harold Crouch. (4) Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter: Gerakan Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970-1974 karya Rum Ali. (5) Hati Nurani Seorang Demonstran: Hariman Siregar ditulis oleh Mochtar Lubis. (6) Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980: Dari Pemilu Sampai Malari karya Heru Cahyono. (7) MALARI melawan Soeharto & barisan jenderal Orba: Kesaksian Seorang Jurnalis Anti Orba ditulis oleh Jopie Lasut.

2. Kritik Sumber

Langkah kedua dalam metode penelitian sejarah yaitu kritik. Dalam langkah ini peneliti melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk menguji otentisitas dan kredibilitasnya yaitu melalui dua tahap kritik ekstern dan kritik intern (Gottschalk, 1985). Kritik sumber dilakukan dengan mencocokkan kesesuaian muatan antar sumber satu dengan yang lain.

3. Interpretasi

Langkah ke tiga yaitu interpretasi terhadap fakta-fakta yang telah diperoleh. Tahap ini merupakan penguraian informasi, fakta, serta relasi antara satu fakta dengan fakta lain dengan tidak meninggalkan ketetapan yang terdapat di dalam penelitian sejarah. Langkah ini menuntut kehati-hatian penulis untuk menghindari terjadinya subyektifitas antara fakta-fakta yang akan digunakan (Kuntowijoyo, 1995:78). Tujuan dari tahap ini yaitu meminimalisir unsur subyektivitas dari penulis, sehingga mampu menyajikan data secara obyektif dan analisa secara umum (Kartodirdjo, 1993).

4. Historiografi

Historiografi yaitu menuliskan kisah sejarah berdasarkan fakta yang diperoleh selama melakukan interpretasi (Gottschalk, 1985). Sumber dan data yang telah diverifikasi dan interpretasi selanjutnya disusun guna menghasilkan narasi sejarah yang utuh.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji Konflik Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo dalam tubuh Militer 1971-1974 adalah pendekatan Politikologis. Menurut Sartono (1992) politikologis menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya. Pendekatan tersebut digunakan untuk menyoroti pertentangan kekuasaan antara Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo dimana kedua tokoh tersebut

merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan di dalam ABRI dan juga dekat dengan Presiden. Kekuasaan yang dimiliki juga cukup tinggi namun perbedaan ideologi menyebabkan timbulnya konflik dan rasa ingin menyingkirkan satu sama lain. Konflik yang terjadi diantara Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo dipicu oleh kepentingan pribadi, salah satunya adalah untuk mempertahankan kekuasaan masing-masing dimana kedua tokoh ini saling berambisi untuk menjadi orang terkuat kedua setelah Presiden.

Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori konflik dari Collins. Teori konflik Collins digunakan untuk menganalisis pertentangan dan konflik antara Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo dalam Tubuh Militer ditahun 1971-1974. Jika mengacu pada teori konflik Collins, Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo terlibat dalam konflik ideologi dengan ABRI sebagai arena konflik. Perbedaan kepentingan dan pemikiran mengenai profesionalisme ABRI telah menimbulkan konflik antara Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo. Konflik tersebut memengaruhi hubungan sosial antara Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo yang menyebabkan hilangnya rasa solidaritas sosial sebagai sesama elite militer (Collins, 1975). Perebutan kedudukan dalam tubuh golongan elite menyebabkan munculnya usaha untuk saling menyingkirkan satu sama lain antara Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo.

Hasil dan Pembahasan

Ideologi adalah suatu pemikiran atau gagasan tentang cara memajukan suatu bangsa dengan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya yang merupakan cita-cita atau tujuan dari suatu bangsa. Perbedaan ideologi antara Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo menjadi pemicu pertentangan diantara keduanya. Jenderal Soemitro adalah seorang jenderal berfaham liberal yaitu faham yang berdasarkan pada kebebasan, memerlukan persetujuan dari yang diberi diperintah, serta persamaan di mata hukum. Jenderal Soemitro memberikan kesempatan bagi rakyat maupun mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah. Sementara Jenderal Ali Moertopo adalah seorang yang machiavellis yang berpandangan bahwa apapun yang dilakukan demi negara dan pemerintahan, adalah baik dan sah untuk dilakukan. Oleh karenanya, atas dasar kepentingan Presiden Soeharto dan rezimnya, Jenderal Ali Moertopo tidak segan untuk mengorbankan sekelompok orang.

ABRI memiliki ideologi yang berlandaskan Pancasila dengan tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Dengan tanggung jawab tersebut, berbagai permasalahan politik dari awal kemerdekaan hingga pemerintahan Soeharto turut menjadi perhatian militer. Dimasa demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami krisis politik berupa pergolakan diberbagai daerah seperti DI-TII, PRRI, atau Permesta. Keadaan tersebut berhasil diatasi dengan berlakunya SOB (Peraturan Negara dalam Keadaan Darurat Perang) pada tahun 1957. Atas dasar tersebut, militer sebagai penanggung jawab penjaga persatuan dan kesatuan negara semakin memperluas perannya dalam bidang sosial politik untuk menjaga stabilitas negara (Faida, 2006). Pada masa Orde Baru, ABRI menjalankan tugasnya selaku stabilisator dan dinamisator sebagai aktualisasi dari Dwifungsi ABRI.

Jenderal Ali Moertopo dikenal sebagai seorang militer yang banyak bergerak dibidang intelijen. Jenderal Ali Moertopo adalah orang kepercayaan Soeharto sehingga banyak mendapatkan tugas dalam rangka menegakkan dan memajukan Orde Baru. Jenderal Ali Moertopo pernah ditugaskan untuk memimpin pasukan Caduad dalam operasi Komando Mandala Trikora atau Pembebasan Irian Barat pada tahun 1961 (Moertopo dalam Sudibyo, 2008; CSIS 2004). Ketika terjadi Konfrontasi Malaysia tahun 1964, Ali Moertopo diberi mandat oleh Presiden Soeharto untuk memimpin operasi khusus yaitu menjalin hubungan diplomatis yang bersifat rahasia bersama pemimpin militer Malaysia guna menghentikan konfrontasi tersebut (Sundhaussen, 1986; CSIS 2004). Diranah sipil, Ali Moertopo berhasil mengantarkan Golkar sebagai pemenang dalam Pemilu 1971. Ali Moertopo melakukan kampanye yang dikendalikan oleh sebuah organisasi baru yang didirikan dalam Sekber Golkar yaitu Badan Pemilihan Umum (Bapilu). Kesuksesan Jenderal Ali Moertopo dalam membentuk Golkar sebagai kekuatan politik pada tahun 1971 direspon oleh Jenderal Soemitro dengan mencegah Golkar agar tidak menjelma sebagai basis kekuatan yang dimanfaatkan secara personal oleh Ali Moertopo (Rahmat 2011; Crouch 1986). Dengan kekuasaan

yang dimilikinya (baik di OPSUS maupun di ASPRI), membuat Ali Moertopo dapat eksis di sekitar lingkaran kekuasaan Presiden Soeharto.

Berbicara tentang Jenderal Soemitro, kariernya dalam militer begitu kuat. Sejak naiknya Orde Baru, Soemitro menjadi Wakil PANGKOPKAMTIB dan tahun 1971 Soemitro secara resmi ditetapkan sebagai PANGKOPKAMTIB. Jabatannya sebagai PANGKOPKAMTIB begitu berpengaruh karena untuk menjalankan kekuasaannya sebagai PANGKOPKAMTIB, Soemitro diberikan kekuasaan dengan Keputusan Presiden (Kepres) RI No. 19/1969. Berbekal Kepres tersebut, PANGKOPKAMTIB dapat menggunakan semua alat dan aparatur pemerintah serta mengambil tindakan lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Sutarmi, 2006; Ramadhan 1994; & Cahyono 1998). Jenderal Soemitro disebut-sebut sebagai orang terkuat kedua yang berkuasa atas pasukan militer setelah Presiden Soeharto pada awal tahun 1970-an. Bertemu Ali Moertopo dan Soemitro dengan kekuatan dan kekuasaan masing-masing akan menjadi *boomerang* bagi kelangsungan rezim Orde Baru. Rivalitas akan muncul ketika dua tokoh tersebut bertemu dalam satu ruang yang sama dengan pandangan yang berbeda sehingga akan memicu terjadinya perebutan kekuasaan untuk menanamkan konsep dan pengaruhnya masing-masing.

Jenderal Soemitro berkeberatan jika ABRI terus-menerus terlibat dalam urusan politik seperti Wakil ABRI sebagai Fraksi ABRI di MPR, DPR, dan DPRD. Keterlibatan ABRI dipandang Soemitro sebagai sebuah bantuan ABRI untuk menyelamatkan negara, memaksimalkan jalannya pemerintahan, dan mempertahankan konstitusi. Ketika kehidupan politik telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, secara berangsur-angsur ABRI harus mulai mengurangi campur tangannya dalam politik. Namun dalam praktiknya, beberapa faktor bantuan tersebut dianggap menjadi sesuatu yang permanen. ABRI terdorong untuk terus memasuki kehidupan politik karena tergiur oleh kekuasaan (Samego, dkk, 1998). Oleh karena itu, Soemitro melihat jika Perwira Militer berperan dominan dibidang politik akan berimplikasi terhadap ketidak profesionalan militer.

Ali Moertopo memandang profesionalisme militer secara lebih luas. Menurut Ali Moertopo, ABRI tidak hanya terlibat dalam urusan militer namun juga dapat terlibat urusan politik sekalipun tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Ali Moertopo memandang militer sebagai kekuatan sosial politik harus *powerfull*, melalui prinsip “Dwifungsi ABRI” (Purnomo, 2017; Rahmat 2011). Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah mendapatkan protes dari mahasiswa yang pada awal tahun 1970an menempatkan posisi sebagai resi atau pengecam keadaan sosial pemerintahan. Mahasiswa menilai strategi pembangunan yang digalang Orde Baru tidak *sustainable*.

Jenderal Soemitro menganggap Ali Moertopo telah melakukan tindakan yang mengundang perpecahan berdasarkan kasus RUU Perkawinan. Ali Moertopo sebagai penyusun RUU Perkawinan dianggap menentang ajaran Islam karena terdapat pasal dalam RUU Perkawinan yang bertolak belakang dengan hukum Islam yang berlaku. Pasal 2 ayat 1 dari RUU Perkawinan tahun 1973 menyebutkan bahwa sahnya perkawinan semata-mata apabila dilakukan dihadapan seorang pecatat perkawinan. Disatu sisi, menurut hukum Islam sahnya perkawinan dilakukan menurut keyakinan agama, seperti ijab kabul yang dilakukan oleh wali nikah. Hal tersebut menjadi masalah karena bukan sebagai syarat utama dari sahnya suatu perkawinan. Jika pasal tersebut diterima maka perkawinan bisa dilakukan hanya lewat pencatatan sipil belaka, yang menurut hukum agama Islam dinilai tidak sah karena harus melalui proses hukum agama terlebih dahulu (Cahyono, 1998; Rahmat 2011; Yogaswara, 2009).

RUU Perkawinan yang disusun Ali Moertopo dinilai bertentangan dengan agama dan juga Pancasila dan UUD 1945. Jika RUU yang jelas bertentangan dengan hukum Islam namun tetap dipaksakan menjadi UU, terdapat kemungkinan besar UU tersebut akan sulit berlaku secara efektif di masyarakat yang sebagian besar menganut agama Islam. Menjalankan suatu UU yang bertentangan dengan Islam sama halnya dengan melakukan perbuatan *dosa*. Selain itu apabila ditinjau dari segi hukum ketatanegaraan, UU yang jelas bertentangan dengan hukum Islam bisa disebut kontradiktif terhadap jaminan yang telah diberikan oleh UUD 1945 dalam Pasal 29, yaitu jaminan terhadap kebebasan melaksanakan ajaran agama masing-masing (Hayati, 2021; Siregar, 2022). Atas dasar tersebut, kelompok Islam menentang RUU Perkawinan yang telah disusun oleh

Ali Moertopo dan CSIS. Kelompok Islam menilai RUU tersebut merupakan salah satu cara orang-orang Kristen untuk mewujudkan negara Pancasila yang sekuler yang tidak lain karena kecenderungan ingin berkuasa (Rahmat, 2011). Ali Moertopo adalah Seorang machiavellis yang berpotensi merealisasikan kehendak-kehendaknya.

Generasi muda menanggapi RUU Perkawinan dengan melakukan demo di Gedung DPR tepatnya tanggal 27 September 1973 yang menuntut pembatalan RUU Perkawinan. Pada saat Mukti Ali selaku Menteri Agama sedang membacakan jawaban pemerintah atas RUU Perkawinan, 300 mahasiswa muslim membuat kerusuhan dengan menerobos masuk ke Gedung DPR (Cahyono, 1998; Yogaswara, 2009). Situasi tersebut direspon oleh Presiden Soeharto dengan menugaskan Jenderal Soemitro untuk menyelesaikan konflik RUU Perkawinan. Jenderal Soemitro yang berideologi liberal menyelesaikan konflik RUU perkawinan melalui musyawarah mufakat. Pemuka agama Islam yang hadir dalam musyawarah tersebut diantaranya M. Natsir, Dr. Rasjidi, Syafruddin Prawiranegara, dan Mr. Kasman Singodimedjo. Sementara dalam dialog terakhir kali di rumah Menteri Agama, H. Mukti Ali, dihadiri oleh semua Fraksi di DPR-RI (Tri, 2018, Cahyono 1998, & Ramadhan 1994). Turut hadir Menteri Kehakiman yang didampingi Menteri Sekretaris Negara, Sudarmono. Pada akhirnya Jenderal Soemitro menjadi pihak yang harus bertanggungjawab menyelesaikan konflik UU perkawinan yang dibuat oleh Jenderal Ali Moertopo.

Dalam aspek pembangunan, Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo memiliki strategi yang berbeda. Kelompok Soemitro dan teknokrat berorientasi pada model Amerika yang liberal sehingga membuka diri pada dunia Barat, Bank Dunia, dan IGGI. Sementara itu, kelompok Ali dan CSIS-nya lebih memilih strategi pembangunan yang menekankan kerjasama sektor swasta dengan negara Jepang (Raillon, 1985). Orientasi strategi pembangunan yang berbeda tersebut menjadi gambaran nyata perbedaan kiblat ideologi keduanya. Kelompok Soemitro dan kaum teknokrat berkiblat pada liberalisme khususnya terkait strategi ekonomi kapitalis, sementara Ali Moertopo dan CSIS berkiblat pada Jepang dengan ideologi fasisme yang menekankan peranan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah.

Jenderal Soemitro tidak terlalu menyukai keberadaan lembaga CSIS, OPSUS, dan ASPRI karena dinilai menjadi penghambat kinerja para teknokrat. Contohnya ialah ketika dicetuskannya konsep "Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun" oleh kelompok Ali Moertopo. Sebelumnya, Presiden Soeharto telah menugaskan tim teknokrat yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro untuk membuat suatu rencana penyelamatan atas masalah perekonomian negara yang tengah ambruk akibat kesalahan pengelolaan Orde Lama. Di saat yang bersamaan, Ali Moertopo muncul menawarkan "Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun". Konsep tersebut diterima secara positif oleh Presiden Soeharto untuk menjadi landasan kebijakan jangka panjang pemerintah Orde Baru (Yogaswara, 2009). Strategi pembangunan yang dirancang oleh kelompok Jenderal Ali Moertopo mengganggu kinerja teknokrat karena dianggap suka main potong dan terlalu ikut campur dalam tugas teknokrat. Jenderal Ali Moertopo merupakan salah satu dari perwira yang berperan ganda sebagai Koordinator OPSUS dan juga menjabat di BAKIN yang menangani urusan politik. Campur tangan Ali Moertopo di BAKIN menyebabkan kinerja BAKIN tidak berjalan secara optimal seperti kasus penggalangan bekas DI sebelumnya (Cahyono, 1998; Rahmat, 2011). Oleh karenanya, untuk mengatasi konflik di tubuh BAKIN, OPSUS dan KOPKAMTIB, Soemitro mengusulkan untuk membubarkan lembaga-lembaga tersebut.

Jenderal Soemitro juga tidak menyukai investasi Jepang di Indonesia karena dominasi Jepang atas ekonomi Indonesia telah melahirkan sistem korupsi dibandingkan mitra-mitra sebelumnya seperti Perancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Pengusaha Jepang mempunyai kebiasaan menyuap untuk mencapai tujuannya seperti pada saat konferensi pers perusahaan-perusahaan di Wisma Nusantara. Menjelang Pelita II, Jepang berencana menyediakan hadiah pesawat terbang untuk Indonesia dalam memperlancar hubungan kerja sama Jepang dengan Indonesia (Rizki, 2013; Iin, 2006). Pada akhir tahun 1972, Jepang mempunyai 100 proyek dengan nilai presentase investasi sebesar 15,2 % dari semua investasi yang disetujui. Pada bulan Maret 1973, semua proyek investasi Jepang yang telah mendapatkan izin mulai beroperasi seperti Mitsubishi, Sumitomo, dan Mitsui (Rizki, 2013). Pada perkembangan selanjutnya, keberadaan perusahaan Jepang menjadi salah satu sasaran utama gerakan protes mahasiswa karena investasi

Jepang mendominasi hampir semua bidang usaha di Indonesia meliputi, tekstil, pertambangan, kelautan, dan kehutanan. Adanya kesenjangan antara perusahaan Jepang dengan pribumi menimbulkan keresahan dan aksi protes dari kalangan mahasiswa diakhir tahun 1973 yang memuncak pada pertengahan Januari 1974.

Mahasiswa melakukan demonstrasi yang meluas di beberapa kota seperti di Yogyakarta, Bandung, Ujung Pandang, dan Medan pada awal Januari 1974 sampai menjelang peristiwa Malari 1974. Mahasiswa melakukan pembakaran patung perdana Menteri Jepang Tanaka sebagai bentuk penolakan terhadap investasi Jepang. Demonstrasi juga melakukan pembakaran terhadap patung Soedjono Hoemardani selaku anggota ASPRI (*Harian Indonesia Raya* edisi 2 Januari 1974). Demonstrasi dilakukan mahasiswa ITB dan IPB yang ditujukan pada keberadaan ASPRI yang tidak mempunyai dasar hukum (*Indonesia Raya*, 1974). Dengan demikian orientasi ideologi yang berbeda itu, melahirkan rivalitas Soemitro dengan Ali, termasuk konflik ideologi diantara keduanya.

Konflik ideologi tidak pernah berubah, tetapi unsur-unsur yang terlibat konflik internal dalam tubuh militer tersebut yang mengalami perubahan. Friksi dalam tubuh militer cenderung berdasarkan atas lembaga atau institusi pemerintah yang dijabat oleh Perwira Militer yang bersangkutan, fanatisme rumpun divisi, dan tahun kelulusan di Akademi Militer (Iin, 2006). Pada awal kemerdekaan berkisar tahun 1950-1955, konflik ideologi yang terjadi dalam tubuh militer melibatkan eks-PETA dan eks-KNIL. Setelah tahun 1955, konflik yang muncul dalam tubuh militer melibatkan teknokrat dan mahasiswa turut serta mengambil bagian karena militer telah berada pada posisi penolakan terhadap supremasi sipil dan justru militerlah yang mendominasi kekuasaan.

Simpulan

Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo terlibat konflik ideologi. Jenderal Soemitro yang berideologi liberal menganggap semua orang sama dihadapan hukum dan memberi kesempatan bagi rakyat dan mahasiswa untuk memberikan kritik dan saran untuk pemerintah. Sementara Jenderal Ali Moertopo adalah seorang yang machiavellis yang beranggapan bahwa apapun yang dilakukan untuk negara dan pemerintah adalah baik dan sah untuk dilakukan. Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo terlibat dalam konflik pada saat pembuatan RUU Perkawinan dimana RUU perkawinan yang dibuat oleh Jenderal Ali Moertopo dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang mengundang amarah umat Islam. Presiden Soeharto kemudian memerintahkan Jenderal Soemitro untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo memiliki strategi pembangunan yang berbeda. Kelompok Soemitro dan teknokrat berorientasi pada model Amerika yang liberal, sehingga membuka diri pada dunia Barat, Bank Dunia dan IGGI. Sementara itu, kelompok Ali dan CSIS-nya lebih memilih strategi pembangunan yang menekankan kerjasama sektor swasta dengan Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R. 2004. *Menyilang Kekuasaan Militer Otoriter : Gerakan Kritis Mahasiswa Di Panggung Politik Indonesia 1970-1974*. Kompas.
- Astutik , I. F. 2006. Rivalitas Soemitro Dengan Ali Moertopo Dalam Kancah Perpolitikan Di Indonesia 1971-1974. *Skripsi*. Universitas Negeri Malang.
- Cahyono, H. 1998. *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*. Pustaka Sinar Harapan.
- Collin, F. 1975. *Social Reality*. Routledge.
- Crouch, H. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Sinar Harapan.
- Djamhari, S. A. 1971. *Ichisar Sedjarah Perdjjuangan ABRI (1945-Sekarang)*. Departemen Pertahanan-Keamanaan, Pusat Sedjarah ABRI.

- Duverger, M. 2004. *Sosiologi Politik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, M. 2008. *Profesionalisme Militer : Profesionalisasi TNI*. UMM Press.
- Faida, I. 2006. Peranan Militer Dalam Politik Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1998). *Skripsi*. Universitas Jember.
- Fattah, A. 2005. *Demiliterisasi Tantara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. LKiS Yogyakarta.
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hasyim & Haryanto. 1994. *Mereka Berdua Dipakai Pak Harto Dalam Forum Keadialan*. No. 3 edisi III.
- Hayati, M. 2021. Batas Minimal Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Huntington, S. P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Huntington, S. P. 2003. *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil-Militer*. Grasindo.
- Kartodirdjo, S. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi sejarah*. Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang.
- Lasut, J. 2011. *Kesaksian Seorang Jurnalis Anti ORBA Malari Melawan Soeharto dan Barisan Jenderal ORBA*. Yayasan Penghayat Keadilan.
- Mas' oed, M. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. LP3ES.
- Moertopo, A. 1972. *Dasar-dasar Pemikiran Tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun*. CSIS.
- Moertopo, A. 1974. *Strategi Politik Nasional*. CSIS.
- Muhaimin, Y. A. 1982. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Nasution. A.H. 1971. *Kekarjaan ABRI*. Seruling Masa.
- Partanto, P. A. & Al Barry, B. D. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola.
- Perlmutter, A. 2000. *Militer Dan Politik*. PT Grafindo Persada.
- Poerwadarminta. 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pontoh.C.H. 2005. *Menentang Mitos Tentara Rakyat*. Resist Book.
- Purnomo, K. 2017. *Pertarungan Dua Bintang: Rivalitas Ideologi Soemitro dan Ali Moertopo Tahun 1974-1978*. *Skripsi*: Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahmat, M. A. 2011. *Ali Moertopo & Dunia Intelijen Indonesia*. Narasi.
- Raillon, F. 1984. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*. Terjemahan oleh Nasir Tamara. LP3ES.
- Ramadhan, K.H. 1994. *Soemitro (Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib)*. Pustaka Sinar Harapan.
- Rirzer, G. & Goodman, D. J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.

- Rizki, M. 2013. Investasi Asing Jepang di Indonesia Masa Orde Baru Tahun 1967-1974. *Jurnal*. Vol. 1, No. 2. E-Journal Pendidikan Sejarah. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2391>.
- Rofik, B. M. 2019. Konflik Militer Eks-PETA dan Eks-KNIL dalam TNI Angkatan Darat Tahun 1950-1955. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Said, S. 2001. *Militer Indonesia dan Politik Dulu, Kini dan Kelak*. Sinar Harapan.
- Samego, I. et. al. 1998. *Bila ABRI Berbisnis*. Mizan.
- Sjamsuddin, H. 2007. *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Siregar, A. 2022. Analisa Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batasan Usia Pernikahan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Soebijono, et. al. 1992. *Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press .
- Soemitro. 1995. *Sukses Militer dan Mahasiswa*. Pustaka Sinar Harapan.
- Subagyo. A. tt. Mewujudkan Profesionalisme Tni Ad Di Era Reformasi. *Skripsi*. FISIP UNJANI.
- Sudibyo, I. B. 2008. Peristiwa 15 Januari 1974 Di Jakarta Dipandang Dari Berbagai Komponen Masyarakat (Militer, Mahasiswa, Pemerintah). *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Sundhaussen, U. 1982. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Terjemahan oleh Hasan Basari. LP3ES.
- Suryadinata, L. 1992. *Golkar Dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*. LP3ES.
- Suryohadiprojo, S. 1985. *Sekar Semerbak : Kenangan Untuk Ali Moertopo*. CSIS.
- Sutarmi. 2006. Rivalitas Ali Moertopo Dan Soemitro: Gerakan Mahasiswa Di Bawah Sepatu Lars Pada Peristiwa 15 Januari 1974 di Jakarta. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Sutrisno, B. D. 2002. *Konflik politik di KPU dalam pemilu 1999*. Mutiara Sumber Widya.
- Tamian, A. 2005. *Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru*. Pusat Studi Politik Indonesia (PSPI) FISIP Unas bekerjasama dengan Pusat Studi Politik (PSP) Madani Institute.
- Thalib, H. 2009. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*. Kencana.
- Tim CSIS. 2004. *Ali Moertopo 1927-1984*. CSIS.
- Webster, M. 1908. Merriam Webster's Collegiate Dictionary. Merriam Webster Incorporated.
- Yogaswara, A. 2009. *Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (MALARI)*. Media Pressind.